

SKRIPSI

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENGULANGI
TINDAK PIDANA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg dan 15/Pid.Sus-
Anak/2025/PN Pdg)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh :

ATHIRA PUTRI KHAIRUNISA

2210112082

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

Dosen Pembimbing:

Yandriza, S.H., M.H.

Felia Hermayenti, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No. Reg: 23/PK-IV/IV/2026

	No. Alumni Universitas	Athira Putri Khairunisa	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang/28 November 2004 b. Nama Orangtua : Syamsuardi, S.E., S.H. dan Rika Wahyuni, S.E. c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2210112082	f. Tanggal Lulus : 22 Juli 2026 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan i. IPK : 3,98 j. Alamat : Jl. Gajah Mada No. 54, Nanggalo, Padang	

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENGULANGI TINDAK PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor : 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg dan 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pdg)

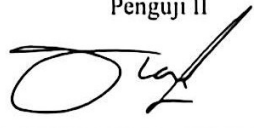
(Athira Putri Khairunisa, 2210112082, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 106 Halaman, 2026)

ABSTRAK

Fenomena anak yang mengulangi tindak pidana menimbulkan dilema dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, karena anak tetap harus dipandang sebagai subjek yang dilindungi hak-haknya, namun pengulangan tindak pidana menunjukkan pemidanaan sebelumnya belum efektif memberikan efek jera. Persoalan ini semakin kompleks karena UU SPPA sebagai *lex specialis* tidak mengatur secara konkret pemidanaan terhadap anak residivis, sehingga hakim mengisi kekosongan tersebut melalui diskresi masing-masing yang berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis disparitas putusan hakim terhadap anak residivis beserta urgensi pengaturannya dalam sistem peradilan pidana anak, menggunakan metode hukum normatif deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, melalui studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan disparitas disebabkan oleh perbedaan orientasi hakim dalam memaknai kepentingan terbaik bagi anak dan ketidakseragaman perlakuan terhadap status residivis sebagai faktor pemberat akibat tidak adanya pedoman normatif dalam UU SPPA, yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori gabungan pemidanaan yang menghendaki integrasi pertanggungjawaban dan pembinaan secara proporsional, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sesuai amanat Pasal 3 Ayat (1) UNCRC dan Pasal 2 UU SPPA. Oleh karena itu, diperlukan norma yang mengatur secara konkret anak residivis, batasan pemberatan pidana, serta bentuk pembinaan yang berbeda dari pelaku pertama agar terwujud kepastian hukum dan keseragaman putusan hakim.

Kata Kunci: Disparitas Putusan Hakim, ABH, SPPA, Kepastian Hukum, Pengulangan Tindak Pidana.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 22 Juli 2026

Tanda Tangan 	Penguji I 	Penguji II 
Athira Putri Khairunisa	Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H.	Iwan Kurniawan, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Pidana: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. University Alumni	Athira Putri Khairunisa	No. Faculty Alumni
	a. Place/Date of Birth : Padang/November 28 th 2004 b. Parent's Name : Syamsuardi, S.E., S.H. dan Rika Wahyuni, S.E. c. Faculty : Law d. Concentration : Criminal Law e. Student ID : 2210112082	f. Graduation Date : July 22 nd 2026 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 3 years 11 Months i. GPA : 3,98 j. Address : Jl. Gajah Mada No. 54, Nanggalo, Padang	

DISPARITY IN JUDGES DECISIONS IN IMPOSING CRIMINAL SANCTIONS ON CHILDREN WHO REPEAT CRIMINAL ACTS (Case Study of Decision Number: 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg and 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pdg)

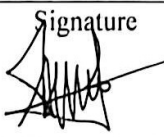
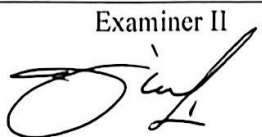
(Athira Putri Khairunisa, 2210112082, *Special Program in Criminal Law (PK IV)*, Faculty of Law, Andalas University, 106 pages, 2026)

ABSTRACT

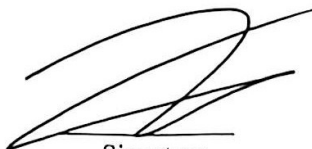
The phenomenon of juvenile recidivism poses a distinct dilemma within Indonesia's juvenile criminal justice system, as children must still be regarded as subjects whose rights are protected, while recidivism itself indicates that prior sentencing has failed to provide an effective deterrent effect. This issue is further compounded by the fact that the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA), as lex specialis, does not concretely regulate the sentencing of juvenile recidivists, leaving judges to fill this normative void through individual discretion that risks producing disparate rulings. This study aims to analyze the disparity in judicial rulings concerning juvenile recidivists and the urgency of establishing clearer regulation within the juvenile criminal justice system, employing a normative legal research method that is descriptive-analytical in nature, using a statutory and case-based approach, through literature review analyzed qualitatively. The findings indicate that this disparity stems from differing judicial interpretations of the best interests of the child and inconsistent treatment of recidivism as an aggravating factor, arising from the absence of clear normative guidelines in the UU SPPA. This gives rise to genuine legal uncertainty that contravenes Gustav Radbruch's theory of legal certainty and conflicts with the integrated theory of punishment, which requires a proportional integration of accountability and rehabilitation while upholding the best interests of the child as mandated by Article 3(1) of the UNCRC and Article 2 of the UU SPPA. Therefore, concrete norms are needed to regulate juvenile recidivism, define the limits of sentence aggravation, and establish rehabilitation measures distinct from those for first-time offenders, in order to achieve legal certainty and uniformity in judicial rulings.

Keywords: Disparity in Judges Decisions, Children in Conflict with the Law, Juvenile Justice System, Legal Certainty, Repetition of Criminal Acts.

This minor thesis has defended in front of the examiner team at July 22nd 2026.

 Signature	 Examiner I	 Examiner II
Athira Putri Khairunisa	Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H.	Iwan Kurniawan, S.H., M.H.

Acquainted,
Head of Department of Criminal Law: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: